

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Negara Indonesia bukan hanya dari aspek perekonomian maupun sosial budayanya saja melainkan dari aspek politik dan pemerintahannya juga mengalami banyak kemajuan. Salah satunya mengenai demokrasi yang menjadi idaman dari masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat.

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, akan tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Demokrasi menghormati adanya perbedaan oleh karena itu demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara. Ketika kebinekaan itu terungkap, maka sistem demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah melalui jalan diskusi, persuasif,

kompromi dan bukan pemaksaan kehendak ataupun dengan pameran kekuasaan.

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of live*) di dalam kehidupan bernegara. Sejak reformasi bergulir di negeri ini, atmosfer demokrasi berhembus kencang di segenap lapisan dan kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyambut “peradaban” baru itu dengan antusias. Kebebasan yang terpasung bertahun-tahun lamanya kembali berkibar di atas panggung kehidupan sosial. Meskipun demikian, atmosfer demokrasi itu tampaknya belum diimbangi dengan kematangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga kebebasan berubah menjadi “hukum rimba”. Mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai “kerikil” demokrasi yang mesti disingkirkan. Sebagai salah satu contoh paling nyata adalah maraknya berbagai aksi kekerasan yang menyertai perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarkhi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang. Bagaimana mungkin nilai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai sikap

besar kepala dan ingin menang sendiri. Bagaimana mungkin atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan.

Adanya sikap yang tidak mau menerima kekalahan, mengekang pendapat orang lain, menyuarakan pendapat dengan unjuk rasa yang pada akhirnya berakhir dengan kerusuhan yang sampai berakibat korban jiwa dan materi, dan yang lebih ironis yang dilakukan para elit politik yang tidak memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi, yang tidak mau menerima suatu aspirasi yang berbeda yang berujung pada perkelahian. Hal-hal itu merupakan sebagian dari kejadian dinamika kehidupan bangsa ini.

Peristiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Diantara urgensi nilai-nilai demokrasi tersebut adalah (1) kebebasan untuk berpendapat, (2) kebebasan untuk membuat kelompok, (3) kebebasan untuk berpartisipasi, (4) kesetaraan antar warga, (5) saling percaya, (6) kerjasama. Akan tetapi mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasio heterogenitas yang tinggi segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dibarengi dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal yang paling urgensi seperti inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna meminimalisir kesalahfahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi yang seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat.

Dilihat dari perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini, masih terdapat kekurangan untuk mencapai demokrasi yang didasarkan pada kriteria ideal dari demokrasi yang sesungguhnya. Hal itu dapat terlihat dari kejadian-kejadian tentang sikap dari sebagian kelompok yang mengedepankan pemaksaan kehendak demi menyuarkan aspirasinya, dengan anarkisme, mengganggu orang lain dan tidak mau menerima kekalahan kesemuanya itu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hakekat dari demokrasi yang sesungguhnya.

Sejalan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, merupakan salah satu hal yang kurang baik apabila terus dilakukan bahkan apabila sampai dicontoh para generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut salah satu jalan adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan mencakup ruang lingkup yang luas, dengan tujuan membangun kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian yang demikian, jelas memerlukan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Oleh sebab itu, masalah pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masing-masing individu, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan manusia agar mampu mandiri, mengembangkan potensi diri, menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dan dapat hidup dalam pembangunan bangsa. Salah satu tuntutan mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini adalah peningkatan mutu pendidikan. Hal ini timbul karena semakin tingginya

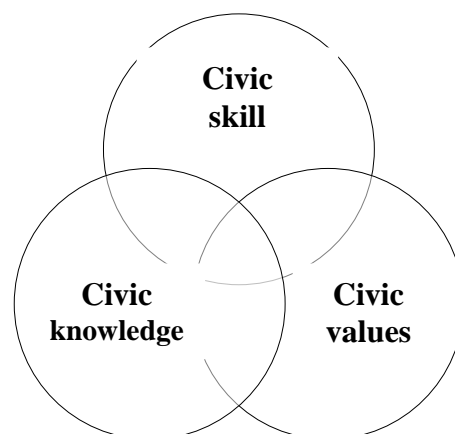
kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam memenuhi harapan serta tujuan tersebut. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi muda penerus bangsa yang berkemampuan, cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan berbangsa. Sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memperhatikan isi dari UU No. 20 tahun 2003 tersebut, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan Kewarganegaraan berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila. Usaha sadar ini dilaksanakan secara terarah dan terencana, yang dimanifestasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui pendidikan formal. Kajian atau titik sentrum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka sebagaimana dapat digambarkan, kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai berikut :

**Gambar 1 : Dimensi Materi Pendidikan Kewarganegaraan.**



**Sumber : Depdiknas, 2003: 2**

Diagram di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari 3 dimensi, antara lain: Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, kebebasan individual, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas. Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kedewasaan dan wawasan anak didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Pengembangan demokrasi, merupakan salah satu dari kesembilan aspek kesadaran dan wawasan anak didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdapat dalam kajian dan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Maka oleh karena itu pemahaman konsep Pelaksanaan demokrasi pada anak didik perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar anak didik sebagai generasi penerus bangsa mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan,

diperoleh keterangan dan data bahwa diantara materi yang dipelajari di kelas VIII semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013, materi demokrasi adalah materi yang penerapannya sulit dilaksanakan oleh anak didik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, banyak siswa yang menampakkan gejala sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kasus yang terjadi diantaranya masih banyak siswa yang mendominasi pendapatnya saat diskusi, dan kurang memberikan kesempatan pada teman-temannya yang lain, pada proses pembelajaran di kelas yang menggunakan metode diskusi masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi atau bersikap apatis, Selain itu pada saat diskusi kelompok di depan kelas siswa cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari rekannya.

Hal tersebut terjadi pada saat presentasi di depan kelas apabila dalam diskusi tersebut ada yang menyanggah jawaban yang diberikan, maka diantara siswa yang memberikan jawaban bersikukuh bahwa jawaban yang diberikan kelompok mereka adalah yang paling benar, Pada saat diskusi kelas berlangsung dan terjadi silang pendapat biasanya sampai berujung pada rasa ketidaksukaan antar teman yang pada akhirnya mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok diantara mereka (geng), dan lebih ironisnya lagi sampai melakukan intimidasi terhadap siswa lain dengan maksud supaya tujuannya tercapai hal tersebut terjadi biasanya ketika pada saat pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS semua itu dilakukan demi memperoleh kemenangan dalam pemilihan. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, masih kurang memahami konsep pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha yang nyata yang dapat secara efektif dan praktis dapat dilaksanakan sehingga pemahaman konsep demokrasi kepada siswa dapat terlaksana sesuai dengan harapan sehingga hal-hal seperti yang di uraikan tersebut di atas dapat minimal diminimalisir bahkan dirubah lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu adanya penelitian tentang permasalahan ini. Oleh karena itu penulis akan meneliti tentang” Penggunaan Model Pembelajaran *Examples Non Examples* Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Pelaksanaan Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa terhadap konsep pelaksanaan demokrasi masih rendah
2. Siswa masih banyak yang tidak berpartisipasi atau bersikap apatis dalam proses pembelajaran.
3. Materi demokrasi dianggap sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung terdapat siswa yang belum bisa menerima kritikan dan masih selalu mendominasi dalam hal

mengungkapkan pendapat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan, dan dapat fokus mengingat banyak model pembelajaran, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi Penggunaan Model Pembelajaran *Examples Non Examples* Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Pelaksanaan Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran *examples non examples* dalam meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dipilih dan dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan model pembelajaran *examples non examples*.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat bermanfaat dan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak khususnya yang berprofesi dalam bidang pendidikan, antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas serta memperdalam wawasan dalam dinamika pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan masalah proses pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan demokrasi kepada siswa.
- 2) Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk dapat merubah sikap siswa dalam hubungan sosial.
- 3) Bagi guru pada umumnya, sebagai salah satu referensi untuk memahami dan melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan demokrasi kepada siswa SMP dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa.

- 4) Bagi siswa meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan konsep demokrasi dan nilai dalam materi Kewarganegaraan (ranah kognitif), meningkatkan kecerdasan emosional siswa (ranah afektif), meningkatkan keterampilan berwarganegara (ranah psikomotorik).

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang meningkatkan pemahaman konsep pelaksanaan demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

### **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah model pembelajaran *examples non examples*.

### **3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2012/2013.

#### **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan..

#### **5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila sampai dengan penelitian ini selesai.